



Bagian penataan kawasan Tugu Yogyakarta, untuk memindahkan kabel melintang.

KR-Ardhi Wahdan

REVITALISASI TROTOAR SUDIRMAN TAHAP II DIMULAI Padukan Konsep Sumbu Filosofi dan Cagar Budaya

YOGYA (KR) - Pekerjaan revitalisasi trotoar Jalan Jenderal Sudirman Yogyakarta Tahap II akhirnya mulai dikerjakan. Proyek penataan jalur semi pedestrian itu ditargetkan selesai pada 23 Desember 2020 mendatang.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta Hari Setyawacana menjelaskan, proses penandatanganan kontrak proyek tersebut memang paling akhir dibanding tiga proyek fisik lainnya. "Alhamdulillah berkasnya sudah selesai semua dan tandatangan kontrak juga sudah. Sekarang ini sudah ada persiapan lapangan dan tinggal jalan," tandas Hari Setyawacana, Kamis (17/9).

Tiga proyek fisik lain yang sudah berjalan yakni penataan trotoar sepanjang Jalan KH Ahmad Dahlan, pembangunan saluran air hujan (SAH) Jalan Kemas, dan penataan kawasan Tugu Pal Putih. Tandatangan kontrak ketiga pekerjaan itu pun sudah dilakukan sejak pekan lalu, sehingga proses fisik di lapangan juga telah berjalan.

Hari menjelaskan, pekerjaan revitalisasi trotoar Jalan Sudirman Tahap II

sebenarnya satu kesatuan dengan penataan kawasan Tugu Pal Putih. Hanya saja, kedua proyek itu dikerjakan oleh dua pihak ketiga yang berbeda sesuai dengan perencanaan. "Kedua pihak ketiga itu juga sudah kami pertemukan. Ini supaya nanti pekerjaannya bisa dilakukan beriringan kaitannya dengan penataan lalu lintas," imbuhnya.

Karena itu, jika revitalisasi trotoar dimulai sisi Utara terlebih dahulu, maka penataan kawasan Tugu juga dimulai dari arah yang sama. Dengan demikian, rekayasa lalu lintas akan lebih mudah dan tidak saling bertabrakan. Karena selama proses pekerjaan, tidak akan dilakukan penutupan arus kendaraan.

Konsep pekerjaan, Hari mengaku, penataan trotoar di Jalan Jenderal Sudirman yang kelak menjadi jalur semi pedestrian, memadukan konsep Sumbu Filosofi Yogyakarta dengan cagar budaya. Pekerjaan tahap kedua dari Jembatan Gondolayu hingga Tugu menggunakan pendekatan Sumbu Filosofi. Sedangkan pekerjaan sebelumnya dari Simpang Gramedia hingga Jembatan Gondolayu, menggunakan pendekatan cagar budaya. (Dhi)-f

KEMENDAGRI SETUJU

Konser Musik di Pilkada Ditiadakan

JAKARTA (KR) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setuju jika konser musik dan kegiatan kampanye lain yang menimbulkan kerumunan massa ditiadakan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang berlangsung di tengah pandemi Covid-19.

"Yang jelas kita setuju, yang berpotensi rawan menjadi sarana penularan, ya tentu kita, ya tidak apa-apa kalau aturan itu kita perbaiki saya pikir," kata Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar di Jakarta, Kamis (17/9).

Posisi pemerintah sejak awal menurut Bahtiar sudah jelas tidak setuju dengan segala bentuk kerumunan. Sementara, konser musik adalah suatu kegiatan yang memang sangat spesifik, biasanya

konser musik tidak ditentukan jumlah orang yang hadir dan bisa saja menyebabkan kerumunan.

"Jadi segala bentuk konser musik kita tolak, seluruh dunia juga konser musik sedang ditutup kan? Jadi aneh juga kalau kita di Indonesia ini justru masih mengizinkan, itu sikap dari Kementerian Dalam Negeri. Ya kecuali virtual, virtual selama ini kan praktiknya sudah ada, nah kalau itu nggak ada masalah," tuturnya.

Satuan Tugas Penanganan

Covid-19 juga menegaskan larangan seluruh kegiatan kampanye Pilkada Serentak 2020 yang menyebabkan kerumunan. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan hal itu terkait polemik pagelaran konser musik, bazar dan jalan santai sebagai media berkampanye para calon kepala daerah di Pilkada 2020. "Jangan ciptakan kerumunan karena kerumunan tersebut berisiko meningkatkan penularan. Dan semua kegiatan kampanye yang menimbulkan kerumunan dan potensi penularan, itu dilarang," tandas Wiku.

Wiku mengatakan, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 yang merupakan perubahan dari Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020, telah mengatur larangan kampa-

nye yang menimbulkan kerumunan massa. Para calon kepala daerah diminta untuk menggunakan cara-cara kampanye yang sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. "Silakan berkampanye dengan cara lain supaya betul-betul bisa melindungi keselamatan masyarakat," ujarnya.

Komisiner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi sebelumnya menyatakan dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 terdapat ketentuan yang mengatur dapat diselenggarakannya kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye. Kegiatan lain itu dapat dilaksanakan dalam bentuk rapat umum, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik. (Ant)-f

KASUS POSITIF COVID-19

Didominasi Usia Produktif

JAKARTA (KR) - Jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 di Indonesia didominasi kelompok usia produktif yakni rentang usia 19-45 tahun, yang persentasenya mencapai 55 persen dari total kasus positif.

"Ini usia produktif. Penting untuk menjaga stamina tubuh," kata Juru Bicara (Jubir) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito di Jakarta, Kamis (17/9).

Karena itu, Wiku menganjurkan kelompok usia produktif tidak lengah saat menjalankan kegiatan di luar rumah dan selalu menjaga anggota keluarga terutama yang berisiko rentan agar tidak tertular.

Wiku meminta mereka yang termasuk dalam kelompok usia produktif berupaya meminimalkan penggunaan transportasi umum. "Hindari menggunakan transportasi umum untuk mencegah penularan. Hal serupa juga berlaku pada kelompok usia produktif antara 19 sampai 45 tahun yang menjadi kelompok usia terbesar secara persentase yang terkonfirmasi positif," katanya.

Ia mengatakan, kelompok usia produktif dan mobilitas tinggi, serta frekuensi interaksi sosial tinggi berpotensi menjadi *carrier* yang bisa menularkan Covid-19 kepada keluarga kerabat atau kelompok orang-orang yang rentan. (Ant)-f

KEBERADAAN KANTONG PARKIR PERLU PERHATIAN

Dimatangkan, Uji Coba Semi Pedestrian Malioboro

YOGYA (KR) - Pemda DIY tengah mematangkan formulasi rencana uji coba kawasan semi pedestrian Malioboro mulai dari manajemen lalu lintas, pemenuhan kantong parkir, penataan sirip-sirip dan sebagainya pada Oktober 2020. Implementasi kawasan semi pedestrian Malioboro tersebut ditargetkan bisa terwujud atau dilaksanakan pada 2021.

"Secara garis besar sedang kita siapkan formula uji coba kawasan semi pedestrian Malioboro yang masih harus akan diperkuat lagi. Formulasi tersebut mulai dari manajemen lalu lintasnya, penyediaan kantong parkir, penataan sirip dan sebagainya di kawasan Malioboro," ujar Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DIY Ni Made Dwiwandana Indrayanti kepada KR di Yogyakarta, Kamis (17/9).

Made menyampaikan dengan melakukan pembatasan kendaraan bermotor untuk melintasi kawasan Malioboro maka dampaknya besar tidak hanya di ruas jalan utamanya sema-

ta, tetapi di sekitarnya. Untuk itu, pihaknya harus memikirkan kebijakan pengadaan kantong-kantong parkir terutama kendaraan besar seperti bus pariwisata dan sebagainya karena sangat penting dalam penataan semi pedestrian Malioboro termasuk penataan transportasinya.

"Kami masih akan meminta arahan dari Pak Gubernur jika formulasi sudah fix nantinya. Semisal menerapkan manajemen lalu lintas sistem satu arah modifikasi, penambahan kantong parkir, pengaturan sirip-sirip hingga noda transportasinya di kawasan Malioboro," tandasnya.

Kepala Biro Administrasi, Perencanaan dan SDA Setda DIY tersebut menegaskan pihaknya tidak semata-mata memikirkan formulasi uji coba kawasan semi pedestrian tetapi dampak sosial dan ekonominya. Kawasan Malioboro merupakan pusat perdagangan dan perekonomian di DIY sehingga tetap harus ada aktivitas ekonomi sehingga harus berkoor-

dinasi dengan Pemkot Yogyakarta dan komunitas warga sekitar.

"Yang utama bagi Dishub adalah penyediaan kantong parkir yang permanen di kawasan Malioboro yang merupakan bagian dari sumbu filosofi. Kita perlu mencari potensi kantong parkir lain di luar untuk memadai kebutuhan kantong parkir jika kawasan semi pedestrian Malioboro diberlakukan. Kita ingin mengatur mobilisasi di kawasan Malioboro dengan nyaman sehingga perlu dipikirkan fasilitas tempat parkir yang memadai," jelas Made.

Asekda Perencanaan dan Pembangunan Setda DIY Tri Saktiyana mengatakan sudah banyak pemikiran yang disampaikan perihal penataan kawasan semi pedestrian Malioboro selama ini. Bahkan sudah diujicobakan sebelumnya tetapi belum ketemu formula yang pas dan masih banyak menerjunkan banyak petugas untuk mengatur lalu lintas. (Ria/Ira)-d

NAMA KPK SERING DICATUT

Pengisian LHKPN, Cuma-cuma

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan informasi ada beberapa pihak yang mengaku sebagai pegawai KPK atau mitra kerja KPK yang menawarkan bantuan untuk mengisi e-LHKPN calon kepala daerah sekaligus mendapatkan tanda terimanya. Sehubungan hal itu, Ketua KPK Firli Bahuri meminta masyarakat mewaspadai pencatutan nama KPK menjelang perhelatan Pilkada Serentak 2020.

"Pelaku kriminal yang mencatat nama KPK kini melirik perhelatan Pilkada Serentak 2020 sebagai ladang baru yang potensial untuk menjalankan 'usaha jahatnya'," kata Firli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (17/9).

Menghadapi hal itu, KPK mengingatkan masyarakat agar mewaspadai pihak-pihak yang mengaku atau bekerja sama dengan KPK. Sedang modusnya adalah membantu pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai syarat pencalonan bagi calon kepala daerah untuk mengikuti

Pilkada Serentak 2020 dengan meminta imbalan sejumlah uang.

Padahal, jelas Firli, sesuai Surat Edaran (SE) Pimpinan KPK Nomor 07.1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 yang mengatur penyampaian LHKPN wajib dilaksanakan secara online melalui elhkpn.kpk.go.id. Pengisian itu gratis alias tidak dipungut biaya apapun," tuturnya.

KPK juga mendapatkan informasi, ada beberapa pihak yang mengaku sebagai pegawai KPK atau mitra kerja KPK. Hal ini seperti di Banten dan Jabar menawarkan bantuan untuk mengisi e-LHKPN calon kepala daerah sekaligus mendapatkan tanda terimanya.

"KPK gadungan atau pihak yang mengaku bekerja sama dengan KPK tersebut, bahkan sesumbar dapat membantu calon kepala daerah untuk menghindari pemeriksaan LHKPN," kata Firli seraya menandakan tidak ada biaya apapun untuk mengisi LHKPN dan tidak ada peluang sekecil apa pun untuk menghindari pemeriksaan LHKPN. (Fu)-d

Penipuan CPNS Atasnamakan Menteri

JAKARTA (KR) - Penipuan berdalih pengangkatan CPNS kembali terjadi. Sebanyak 55 korban menjadi korban dan telah mentransfer uang sebesar Rp 3,8 miliar kepada oknum yang mengatasnamakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo.

"Kami baru mendapat laporan pagi ini (kemarin). Kemudian langsung ditindaklanjuti oleh Bapak Menteri didampingi Staf Khusus dengan melaporkan kasus ini kepada Kapolda Metro Jaya. Kita tunggu perkembangan selanjutnya," ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Andi Rahadian, Kamis (17/9).

Andi mengatakan, terdapat empat nama yang mengaku sebagai orang kepercayaan Menteri PANRB dan meminta sejumlah uang kepada korban. Empat nama tersebut adalah M Sobirin, Pujiani Wahyuni, Rara Amidi dan Eni Suheni.

Melalui pesan Whatsapp, oknum tersebut menyampaikan kepada korban sebagai peserta CPNS, seolah-olah pembagian Nomor Induk Pegawai (NIP) untuk pusat dilakukan Senin (9/9) bertempat di kantor departemen atau lembaga masing-masing yang mendapat jatah CPNS khusus. Peserta diminta menggunakan baju putih

panjang dan celana hitam dengan membawa nomor register.

Sementara peserta yang belum mendapatkan nomor register harus membawa tanda pengenal. Mereka yang mendapatkan nomor register adalah peserta seleksi tahun 2018. Selain itu, masih satu rangkaian dari kasus penipuan tersebut, ditemukan bukti, terdapat surat palsu yang seolah-olah ditandatangani Menteri PANRB. Di dalam surat palsu tersebut, dijelaskan, menindaklanjuti hasil rapat 26-27 Oktober 2019, para menteri telah menyepakati bahwa jadwal pembagian SKB diputuskan Kamis, 31 Oktober 2019.

Dalam surat palsu itu juga tertulis Menteri PANRB menegaskan kepada seluruh peserta dan orangtua peserta bahwa program CPNS tersebut legal dan bukan penipuan serta hal tersebut menjadi tanggung jawab Menteri PANRB. Dijelaskan, seluruh peserta CPNS sudah memiliki NIP dan SK.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Andi Rahadian menjelaskan, saat ini proses seleksi CPNS tahun anggaran 2019 masuk tahap seleksi kompetensi bidang (SKB). Ia mengingatkan kembali kepada masyarakat agar tidak mudah percaya kepada orang yang memberikan janji. (Ati)-d

MENDARAT DI BANDARA ADISUTJIPTO YOGYAKARTA

43 Napi Bandar Narkoba Dipindah ke Nusakambangan

CILACAP (KR) - Sebanyak 43 narapidana (napi) bandar narkoba yang berasal dari sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Pontianak, Kalimantan Barat, dipindahkan ke Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Kamis (17/9). Dari 43 napi tersebut yang divonis hukuman mati sebanyak delapan orang dan semur hidup 16 orang, selebihnya 19 orang menjalani pidana penjara sementara.

Koordinator Lapas se-Nusakambangan Erwedi Supriyatno mengatakan, dari 43 napi tersebut yang berasal dari Lapas Pontianak sebanyak 26 orang, Rutan Pontianak 12 orang dan Rutan Mempawah sebanyak lima orang. "Di Nusakambangan mereka ditempatkan di Lapas Super Maksimum Sekuriti Karang Anyar sebanyak 23 orang, Lapas Maksimum Sekuriti Narkotika 10 orang dan Lapas Maksimum Sekuriti Basi sebanyak 10 orang," ujarnya.

Rombongan napi dari Kalbar itu diberangkatkan dari Pontianak menggunakan pesawat terbang dan



KR-R. Maksun Noor

Napi bandar narkoba asal Pontianak diturunkan dari bus yang mengangkutnya di Dermaga Wijayapura, Cilacap.

mendarat di Bandara Adisutjipto Yogyakarta sekitar pukul 12.00. Dengan pengawasan ketat, dari Yogyakarta mereka diangkut menggunakan tiga bus pariwisata ukuran tiga perempat dan sampai di Dermaga Wijayapura Cilacap sekitar pukul 16.30.

Namun karena kondisi air laut saat itu tengah surut, bus yang mengangkut rombongan napi Pontianak itu

tidak bisa masuk ke Kapal Ferri Pengayom IV milik Kemenkumham, sehingga satu persatu puluhan napi itu diturunkan dari bus dan dimasukkan ke Kapal Ferri untuk disebarkan ke Dermaga Sodong Nusakambangan. Dari Sodong mereka diangkut menggunakan bus angkutan karyawan dan keluarga menuju Lapas Besi, Lapas Narkotika dan Lapas Karang Anyar. (Mak)-f